

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung; Alfabeta.
- Arif, Bahtiar., dan Muchlis, Iskandar. *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat, 2002
- BPKAD Kabupaten Lamongan. 2020. *Informasi APBD*.
<http://bpkad.lamongankab.go.id/informasi-apbd/> diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 10.00 WIB
- Carr, Jered B. & Ralph S. Brower. 2000. *Principled opportunism: Evidence from the organizational middle*. Public Administration Quarterly (Spring): 109-138
- Danim, Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta; Bumi Aksara
- Fuady, Ahmad Helmy, Dkk. 2002. *Memahami Anggaran Publik*. Yogyakarta; IDEA Press.
- Gilardi, Fabrizio. 2001. *Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation*. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. 127-146
- Halim dan Abdullah, 2006. *Hubungan dan masalah keagenan di Pemerintahan Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No 1.
- Jacoby, J. (2002). *Stimulus-organism-response reconsidered: An evolutionary step in modeling (consumer) behavior*. Journal of Consumer Psychology, 12(1), 51-57.
- Kartika ,H.A 2002. *Proses Penyusunan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah Dan Arah Kebijakan Umum*.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Moe, T. M. 1984. *The new economics of organization*. American Journal of Political Science 28(5): 739-777
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta; Elex Media Komputindo
- Nurul. 2012. *Pengaruh Komitmen Organisasional, Peran Manajer, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Permendagri nomer 13 tahun 2006 *tentang Panduan Penyusunan APBD*
- Permendagri nomer 37 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Permendagri nomer 37 tahun 2012 pasal 1 ayat 2 *tentang Anggaram Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Permendagri no 13 tahun 2006 *tentang Belanja Daerah*

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 89 ayat 3 *tentang Panduan Penyusunan APBD*
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 104 *tentang Panduan Penyusunan APBD*
- Republik Indonesia, Undang – undang nomer 32 tahun 2004, *Pendapatan Daerah*
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*
- Supriadi, Bagus. 2020 , *Jember Jadi Satu-satunya Kabupaten yang Belum Punya APBD 2020*.
<https://regional.kompas.com/read/2020/02/18/16064981/jember-jadi-satu-satunya-kabupaten-yang-belum-punya-apbd-2020>. Diakses pada Tanggal 5 September 2020 pukul 16.00 WIB
- The World Bank. 1994. *World Bank Development Report 1994 : Infrastructure For Development*. New York. Oxford University.
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 18 ayat 5, Pemerintah Daerah
- Varlord. 2014. *Sistem Pemerintahan Indonesia*,
<https://brainly.co.id/tugas/1386749#readmore>, diakses pada 1 November 2020 pukul 13.00 WIB
- Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Buku I. Cetakan I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Wildan, Muhammad. 2019. *Alokasi APBD Paling Dominan untuk Belanja Pegawai*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190719/10/1126443/alokasi-apbd-paling-dominan-untuk-belanja-pegawai->. Diakses pada tanggal 1 November 2020 pukul 12.00 WIB
- Wildavsky, Aaron, Dkk. 2012. *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta; Matapena Consultin